

**ANALISIS KOMPETENSI APARATUR DESA DI KANTOR DESA LINAWAN 1
KECAMATAN PINOLOSIA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN**

**ANALYSIS OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCE AT THE LINAWAN 1
VILLAGE OFFICE, PINOLOSIA DISTRICT, SOUTH BOLAANG
MONGONDOW REGENCY**

Ramla Bajeneti¹⁾, Djamila Podungge²⁾, Desi Putri Dama³⁾

^(1,2,3)Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email : ramlabajeneti@gmail.com

Email : milapodungge@ubmg.ac.id

Email : Desiputridama25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the level of understanding of village apparatus regarding their primary duties and functions, as well as to assess their ability to use Information and Communication Technology (ICT). This research uses a qualitative descriptive research type. This research employs a method that aims to describe and interpret the object in accordance with field reality. The use of the explanatory method seeks to create, systematically and factually, descriptions, illustrations, or depictions of the facts, characteristics, and relationships among the phenomena being investigated. The results are expected to serve as a basis for planning to improve the capabilities of village apparatus to realize more professional, efficient, and flexible village governance in line with development.

Keywords: Village Apparatus Competence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur desa terhadap tugas pokok dan fungsi serta mengetahui kemampuan aparatur desa dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien, dan fleksibel seiring perkembangan.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa perangkat desa, yang dibantu oleh kepala desa, memiliki peran strategis dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang efisien dan efektif di tingkat lokal. Perangkat desa harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai, baik dari segi pengetahuan,

keterampilan, maupun sikap.

Pemerintah desa adalah bagian dari struktur organisasi pemerintahan yang berada pada lapisan paling bawah, yang memiliki tanggung jawab langsung untuk mengatur pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tujuan organisasi untuk memperkuat legitimasi dan arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip-prinsip ini termasuk akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan informasi publik, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang didasarkan pada keterlibatan dan kepercayaan masyarakat.

Pembangunan sebuah desa sangat bergantung pada keahlian aparatur pemerintah desa, terutama dalam pembuatan dan penyusunan kebijakan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Profesi ini mencakup pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaannya.

Upaya mendorong Pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan berbagai komponen dari masyarakat desa, Lembaga, kemasyarakatan, tokoh masyarakat, hingga kelompok rentan, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan warga. Salah satu tanda pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan. Oleh karena itu, profesionalisme aparatur desa tidak hanya diukur dari kemampuan administratif mereka, tetapi juga dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Berdasarkan situasi seperti ini, peraturan desa tidak hanya harus sesuai dengan hukum tetapi juga dapat memenuhi keinginan semua anggota masyarakat desa. Proses pembuatan peraturan desa yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Keterlibatan yang menyeluruh ini akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang ditetapkan dan mendorong pelaksanaan pembangunan desa yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Maka agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa benar-benar memenuhi kebutuhan nyata masyarakat desa, pemerintah desa harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk merumuskan kebijakan di tingkat desa. Peraturan Desa, yang secara formal ditetapkan, memberikan dasar hukum dan garis besar strategis untuk menjalankan pemerintahan desa.

Maka daripada itu peraturan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga merupakan alat penting untuk membangun tata kelola desa yang berpartisipasi, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Peraturan desa yang lebih baik disusun dalam hal substansi, partisipasi, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara mandiri dan inklusif. Dengan kata lain, kemampuan pemerintah desa untuk membuat kebijakan yang baik menunjukkan kapasitas institusi yang profesional dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat desa.

Tingkat profesionalisme aparatur pemerintah desa sangat penting untuk keberhasilan pembangunan desa, terutama dalam peran strategis mereka dalam menyusun dan menetapkan kebijakan lokal melalui peraturan desa. Tingkat profesionalisme ini ditunjukkan dengan kemampuan aparatur desa untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan regulasi yang berlaku. Regulasi tersebut menegaskan bahwa peraturan desa adalah alat hukum yang mengatur kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat desa dan merupakan fondasi untuk pembangunan yang berpartisipasi dan berkelanjutan.

Menurut Hardi (2022) dalam [5] pelaksana utama berbagai kebijakan, program, dan layanan publik, aparatur merupakan komponen yang sangat penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Aparatur yang berfungsi secara optimal menunjukkan sikap kreatif, inovatif, dan produktif, yang akan memungkinkan organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Aparat desa yang kompeten pasti akan meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Kompetensi yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Kinerja aparat yang baik akan berdampak langsung pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan program pembangunan desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Kompetensi ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan peran masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, peningkatan daya saing daerah dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa, terutama dalam hal meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur desa tidak hanya menjalankan administrasi tetapi juga bertindak sebagai penggerak perubahan yang mendorong perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan di lingkungan mereka.

Hal ini akan berdampak langsung pada keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, baik dari aspek kualitas pelayanan publik maupun pencapaian tujuan pembangunan. Sebaliknya, jika aparatur tidak bekerja dengan baik, tidak produktif, atau bahkan mungkin pasif, kualitas kinerja organisasi akan menurun, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang menerima layanan tersebut.

Namun, dalam kenyataannya, aparatur desa yang belum memahami semua tanggung jawab dan tugas yang diemban. Ketidaktahuan tentang tupoksi ini menyebabkan program kerja tidak terarah dan administrasi pemerintahan tidak terorganisir. Sebaliknya, karena digitalisasi semakin berkembang, aparatur desa harus mampu menggunakan komputer dan sistem informasi. Kurangnya kemampuan untuk menggunakan teknologi ini menyebabkan pelayanan yang lambat, efisiensi kerja yang rendah, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan administrasi desa.

Selain keterbatasan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat, aparat desa tidak memahami tugas dan fungsi utama. Kurangnya kemampuan ini tidak hanya menghambat proses kerja internal, tetapi juga menyebabkan layanan publik yang buruk dan pembangunan desa yang terhambat. Jika situasi ini tidak segera ditangani melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan berkelanjutan, kualitas tata

kelola pemerintahan desa akan tetap stagnan atau bahkan menurun.

Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah tantangan tambahan yang dihadapi aparatur desa di era digital saat ini. Padahal, mengubah pemerintahan menjadi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Aplikasi *e-government*, pelaporan berbasis online, dan sistem keuangan desa (Siskeudes) membutuhkan aparatur desa yang tidak hanya mampu secara teknis tetapi juga melek digital. Kurangnya kemampuan untuk menggunakan aplikasi administrasi dan perangkat komputer menyebabkan rendahnya efisiensi kerja dan keterbatasan transparansi dalam operasi pemerintahan desa.

Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan, memiliki tanggung jawab strategis untuk menjalankan pemerintahan, membangun, dan memberdayakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparatur desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa beroperasi dengan baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat desa sangat bergantung pada kompetensi aparatur desa.

Desa Linawan 1 merupakan salah satu desa di Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Aparatur desa menghadapi masalah yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian mereka dalam pekerjaan. Keterbatasan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa. Administrasi dan pelayanan masyarakat tidak berjalan secara efektif, efisien, maupun terarah karena beberapa aparatur desa belum sepenuhnya memahami tugas apa yang harus mereka lakukan.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya pelatihan berkala tentang Tupoksi. Aparatur desa bekerja secara konvensional dan reaktif tanpa arah yang jelas dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik karena tidak ada program pembinaan berkelanjutan. Selain hambatan dalam pemahaman Tupoksi, rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah masalah yang cukup signifikan. Dalam era teknologi informasi saat ini, TIK menjadi sangat penting untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa di desa Linawan 1 masih kesulitan menjalankan komputer, perangkat lunak administrasi, dan aplikasi digital yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Keterbatasan dalam penggunaan TIK ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis; faktor usia, tingkat pendidikan, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai, juga berkontribusi. Akibatnya, digitalisasi pelayanan desa masih belum dilaksanakan secara optimal, yang seharusnya dapat meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pemahaman aparatur Desa Linawan 1 tentang tugas dan fungsi utamanya serta kemampuan mereka dalam menggunakan Teknologi informasi dan komunikasi. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien, dan fleksibel seiring perkembangan.

Dari permasalahan diatas penulis mengangkat judul Analisis Kompetensi Aparatur Desa. Di kantor Desa Linawan 1 Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Manajemen

Menurut George R. Terry [4] manajemen sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, dan pengawasan.

Adapun menurut Stoner J.A., R.E [15] Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar men capai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Luther Gulick dalam [12] manajemen dapat diartikan sebagai kiat, ilmu, atau profesi. Ini dilakukan karena manajemen dianggap sebagai bidang pengetahuan yang menyelidiki mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Menurut Bukit, Malusa, dkk 2017 dalam [14] manajemen sumber daya manusia adalah hasil dari kerja sama antara perancangan, penyusunan, pengelolaan, dan penilaian yang digunakan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi untuk menentukan arahnya. Sumber daya manusia berbeda dari sumber daya lainnya karena mereka memiliki akan, pikiran, dan perasaan yang berbeda.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Mathis & Jackson [2] Sumber daya manusia dipandang sebagai desain sistem formal dalam suatu organisasi.

Menurut Hasibuan [2] mendefinisi kan sumber daya manusia sebagai total kapasitas yang dihasilkan dari kemampuan mental dan fisik setiap orang. Kemampuan ini memerlukan motivasi untuk bekerja.

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Nasution, M [6] mengungkapkan bahwa Kompetensi aparatur merupakan kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Menurut Kusnanto, H., & Dewi, I. S [6] mengatakan bahwa kompetensi aparatur adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkungan kerja.

Menurut Veitzal Rivai, Untung dan Agus [13] kemampuan seseorang merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dan seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu:

1. Kemampuan intelektual
2. Kemampuan Fisik

Menurut Mangkunegara [13] komponen-komponen kompetensi adalah berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya, yaitu terdiri dari:

1. Pengetahuan dalam bidang yang telah ditentukan.
2. Kemampuan yang dimiliki sesuai dengan keahliannya
3. Keterampilan merupakan keterampilan yang menunjukkan system atau urutan perilaku

yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja.

Aparatur Desa

Menurut Widjaja [8] aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya.

Menurut Suryani et al (2021) (dalam [6] menyatakan bahwa aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya (desa) akan menyusun kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan tujuan dari visi dan misi desa yang ingin dicapai dalam rencana kerja desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja dalam organisasi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa aparatur desa saat ini sangat penting keberadaannya dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono [5] Penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa informasi deskriptif seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai kompetensi aparatur desa.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni informan penelitian yang terdiri dari Sekertaris desa, Kepala Urusan, Kepala Kasie, dan masyarakat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai alat penunjang dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya serta diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah melalui beberapa tahapan yaitu [3]:

1. Transkripsi: data wawancara dicatat dan ditranskripsikan secara lengkap
2. Kategorisasi: data dikelompokkan berdasarkan tema-tema atau indikator kompetensi aparatur desa
3. Penyusunan narasi: data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah proses analisis

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan Teknik triangulasi [3]. Triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data dari sumber, Teknik, atau waktu.

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber: membandingkan data yang di peroleh dari berbagai informan seperti pemerintah desa, aparatur desa, tokoh Masyarakat.
2. Triangulasi Teknik: membandingkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data.
3. Triangulasi waktu: pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh informasi

Dengan menggunakan Teknik ini, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga Kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

HASIL PENELITIAN

1. Kualitas Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Motivasi Kerja.

Semangat kerja aparatur Desa Linawan I dapat meningkat apabila didukung oleh berbagai faktor, seperti adanya penghargaan dan tunjangan yang layak, kesempatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, lingkungan kerja yang positif, serta kepemimpinan yang efektif. Selain itu, rasa tanggung jawab terhadap tugas, kerja sama tim yang solid, dan apresiasi dari pimpinan juga menjadi pendorong utama meningkatnya semangat kerja aparatur. Faktor-faktor tersebut menciptakan suasana kerja yang harmonis, menumbuhkan motivasi internal, dan memperkuat komitmen aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Perkembangan Teknologi Dan Fasilitas Lingkungan Kerja

Kondisi sarana dan prasarana di Kantor Desa Linawan I secara umum tergolong baik dan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas seperti meja, kursi, komputer, dan perangkat pendukung lainnya berfungsi dengan baik dan membantu kelancaran kegiatan administrasi pemerintahan desa. Meskipun demikian, terdapat beberapa fasilitas yang mulai mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki agar tidak menghambat aktivitas pelayanan. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana di Kantor Desa Linawan I sudah mampu menunjang kinerja aparatur desa, namun tetap memerlukan perhatian dan pemeliharaan berkala untuk menjaga efektivitas pelayanan publik.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Keluhan utama masyarakat Desa Linawan I berkaitan dengan keterlambatan proses administrasi akibat ketidakhadiran Kepala Desa untuk menandatangani dokumen resmi. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menyelesaikan urusan administrasi, seperti pengesahan surat atau dokumen penting. Meskipun demikian, aparatur desa lainnya tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan membantu masyarakat dalam proses administrasi yang bisa dilakukan tanpa menunggu Kepala Desa, sehingga pelayanan tetap berjalan meskipun mengalami sedikit keterlambatan. Selain itu, sebagian masyarakat mengapresiasi aspek pelayanan lain yang sudah berjalan baik, seperti pelayanan surat-menyurat yang cepat dan tertib, serta penyaluran bantuan sosial yang dinilai tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.

4. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Aspek pelayanan yang perlu diperbaiki di Kantor Desa Linawan I terutama berkaitan dengan kedisiplinan, kehadiran aparatur desa, serta peningkatan peran dan tanggung jawab pimpinan dalam mengawasi jalannya pelayanan. Beberapa aparatur masih belum konsisten hadir selama jam kerja, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan disiplin kerja menjadi hal yang sangat penting agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal.

Selain itu, koordinasi antarperangkat desa perlu ditingkatkan, terutama dengan adanya dukungan dan arahan langsung dari Kepala Desa agar setiap perangkat memahami tugas dan perannya secara jelas. Kepemimpinan yang aktif dan komunikatif dinilai dapat menciptakan suasana kerja yang lebih efektif serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparatur dalam penggunaan teknologi, khususnya komputer dan aplikasi administrasi desa, untuk menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan publik yang modern dan efisien.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa meskipun pelayanan di Desa Linawan I telah berjalan baik, masih diperlukan perbaikan pada aspek kedisiplinan, koordinasi internal, kemampuan teknologi, dan keterlibatan pimpinan, agar pelayanan desa ke depan menjadi lebih efektif, profesional, dan sesuai harapan masyarakat.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Pemahaman Aparatur Desa Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Hasil menunjukkan bahwa aparatur Desa Linawan 1 telah memahami tugas-tugas dasar yang menjadi bagian dari pekerjaan rutin mereka, seperti pelayanan administrasi kependudukan, penyusunan surat-menyurat, pengelolaan dokumen pemerintahan, serta pelayanan masyarakat. Namun beberapa aparatur masih kesulitan membedakan secara jelas antara tugas, fungsi, dan wewenang pada jabatan masing-masing. Seorang aparatur menyatakan, “Kami sudah tahu tugas-tugas di sini, cuma kadang bingung juga mana yang termasuk tugas utama dan mana yang hanya membantu.” Sementara itu, kepala dusun memahami tugas pembinaan masyarakat di wilayahnya, tetapi belum melaksanakan pelaporan kegiatan secara tertib dan terdokumentasi. Salah seorang informan masyarakat menyampaikan bahwa pelayanan desa sebenarnya sudah baik, tetapi kadang mengalami keterlambatan karena aparatur belum memahami prosedur pelayanan secara menyeluruh. Informan tersebut menyatakan, “Pelayanan sudah baik, cuma kadang lambat karena petugas tidak langsung tahu apa yang harus dilakukan.” Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas aparatur masih bergantung pada kebiasaan dan pengalaman, bukan berdasarkan pemahaman terhadap Tupoksi yang tertulis.

2. Tingkat Kemampuan Aparatur Desa Dalam Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa kemampuan TIK aparatur Desa Linawan 1 masih tergolong rendah. Sebagian aparatur hanya mampu mengoperasikan Microsoft Word untuk keperluan surat-menyurat. Sementara itu, kemampuan menggunakan Microsoft Excel, terutama untuk kebutuhan perekapan

data, masih terbatas. Selain itu, penggunaan aplikasi desa seperti Siskeudes belum optimal karena hanya digunakan oleh segelintir aparatur yang dianggap lebih memahami teknologi. Hal ini membuat beban kerja tidak merata dan menghambat proses administrasi desa. Keterbatasan sarana dan prasarana turut mempengaruhi rendahnya kemampuan TIK aparatur. Komputer yang tersedia di kantor desa masih terbatas dan ada beberapa perangkat yang tidak berfungsi dengan baik. Jaringan internet yang tidak stabil juga sering menghambat pekerjaan yang memerlukan penggunaan aplikasi berbasis daring. Selain itu, sebagian aparatur berusia lanjut mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga penggunaan komputer masih dilakukan hanya ketika ada kebutuhan mendesak. Minimnya pelatihan TIK yang diselenggarakan secara formal turut memperburuk kondisi ini.

PENUTUP

Simpulan

1. Kompetensi aparatur desa secara umum sudah cukup baik, ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta sikap yang ramah dan sopan dalam melayani masyarakat.
2. Kedisiplinan dan kehadiran aparatur desa masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat perangkat desa yang tidak selalu berada di kantor selama jam pelayanan, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Kepemimpinan Kepala Desa berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang efektif. Diperlukan perhatian dan keterlibatan lebih dari pimpinan agar koordinasi antarperangkat berjalan lancar serta mampu memotivasi kinerja aparatur.
4. Kemampuan teknologi dan literasi digital aparatur desa masih terbatas. Penguasaan komputer dan aplikasi pelayanan desa perlu diperkuat agar pelayanan administrasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sesuai perkembangan zaman.
5. Dari sisi masyarakat, tingkat kepuasan terhadap pelayanan desa tergolong baik, meskipun masih ada beberapa keluhan, terutama terkait keterlambatan tanda tangan dan cap Kepala Desa yang tidak selalu berada di tempat.

Saran

1. Perlu diadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh aparatur desa, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan pelayanan publik, agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan efektif.
2. Pimpinan desa perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan aparatur, dengan memastikan kehadiran perangkat desa selama jam kerja serta pemberian sanksi atau penghargaan yang sesuai untuk meningkatkan motivasi kerja.
3. Kepala Desa diharapkan lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penandatanganan dokumen dan kehadiran di kantor desa agar proses administrasi tidak terhambat.
4. Perlu optimalisasi penggunaan teknologi dan digitalisasi pelayanan, seperti penerapan sistem surat menyurat digital atau aplikasi pelayanan masyarakat, untuk mempercepat dan mempermudah proses birokrasi di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Maulana, T. S. (2025). HUMAN CAPYTAL MANAGEMENT IN TORISM MANAGEMENT AT THE GORONTALO CITY TOURISI AND CULTURE OFFICE. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 13(2), 95-111.
- [2] A.putri Andini,Ilham tahier, Nurlela, Natasyah, Mutai nurfadilah aris, Tia juliawati, Ririn anita, H. (2020). *Pengertian Sumber Daya manusia dan pengembangan menurut 7 orang pakar*. 21–31.
- [3] Ahmad, H. (2020). Analisis Kompetensi Aparat Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *E-Journals Uniervsitas Bina Mandiri Gorontalo*, 1, 8–20.
- [4] Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, F. L. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Manajemen Dan Eksekutif*, 3(2), 1–14.
- [5] Cahya, S., Ramadhan, P., & Darmi, T. (2024). *Analisis Kompetensi Aparatur Desa (Studi Pada Kantor Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara).* 1(2), 119–127.
- [6] Eko Budi Sulistio1, Simon Sumanjoyo Hutagalung2, dan M. I. F. (2023). Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022) Eko. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(1), 83–97. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.367>
- [7] Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Nenny Ika Putri Simarmata Unang Toto Handiman, Marthinus Ismail, Guntur Suryo Putro Darwin Lie, Ramlah P, Maretta Ginting, Arfiany Ilma Indriasri Pratiwi, Nurlinawati Simanjuntak Rizka Nugraha Pratikna, A. N. (2022). Teori Organisasi dan Manajemen. In *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 14, Issue January).
- [8] Masito Galingging1, Hanafi2, T. H. (2022). *Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Muara Hutarajakecamatan Muara Batang Toru*. 5(1), 25–28.
- [9] Ranto, F. F., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. *Jap*, 8(115), 42–48.
- [10] Rifa'i, A., & Suparti, H. (2023). Peran Kepala Desa sebagai Motivator dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat di Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 27–36. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/734>
- [11] Sari Fatika Cindy, Assajad Malik Ibnu, & Ansori Isa Moch. (2023). Kompetensi Individu (Individual Competence). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* , 1(4), 201–214.
- [12] Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- [13] Vernia, D. M., & Sandiar, L. (2020). Peranan Kompetensi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(2), 91–99.

- [14] Widyastuti, E., & Riantisari, R. (2023). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. *Jurnal Manajemen*, 13(1), 82–88.
- [15] Yulianto, R., Ramadhan, D. S., & L, dan S. A. (2021). *Aspek Manajemen*. September, 32.